

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILAHAN UMUM
KEPALA DAERAH 2020 :
PERSPEKTIF SOSIOLOGI PEMBANGUNAN**

Oleh;

Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum, dan Kodar Hudiwasono

*Pejabat Fungsional Perencana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia

**Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Publik dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat

***Pejabat Fungsional Perencana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia

Abstrak

Pada Pilkada Tahun 2020 diramaikan oleh setidaknya 16 (enam belas) kontestan yang terafiliasi sebagai politik kekerabatan. Hal ini telah menimbulkan pihak-pihak yang mendukung dan menolaknya dengan berbagai argumen masing-masing. Pada hakikatnya politik kekerabatan ini sudah lama dilakukan di Indonesia, serta bukan hanya di Indonesia tapi peristiwa ini telah terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Berdasarkan latar belakang ini, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif sosiologi pembangunan terhadap pemilihan umum kepala daerah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan pengamatan. Studi dokumen dan pengamatan dilakukan untuk mencari informasi tentang politik kekerabatan di Indonesia. Studi pengamatan dilakukan pada berita-berita yang terkait. Studi dokumen dilakukan pada buku, jurnal, putusan pengadilan yang terkait. Setelah diperoleh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan sebagai jawaban dari permasalahan,

yaitu : dalam kajian ilmu sosiologi pembangunan terhadap politik kekerabatan ini tidak melihat pada apakah politik kekerabatan diperbolehkan atau tidak, serta tidak juga melihat dukungan atau penolakan terhadapnya, akan tetapi untuk mengukur politik kekerabatan ini dinilai berhasil atau tidak dengan menggunakan ketiga indikator yaitu : (1) produktifitas, (2) efisiensi dan (3) partisipasi masyarakat, indikator sebagai ukuran ini dapat pula diterapkan pada konstelasi yang tidak berkaitan dengan politik kekerabatan. Dengan kata lain, berdasarkan kajian ini, sosiologi pembangunan tidak mempersoalkan politik kekerabatan dalam konstelasi pertarungan pilkada baik pada tahun 2020, sebelum tahun itu ataupun setelahnya jika ketiga indikator tersebut terpenuhi.

Kata Kunci : Politik Kekerabatan; Perspektif; Sosiologi; Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Sejumlah calon kepala daerah terafiliasi politik kekerabatan atau dalam bahasa lain politik dinasti (Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. 2006:12), ikut meramaikan kontestasi Pilkada 2020. Berikut sejumlah pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik di Pilkada 2020 (Friski Riana, 2020:1-2) :

1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 02 Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman.

Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

2. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Gibran adalah anak Presiden Jokowi.
3. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 03 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Pilar merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana,

- Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang Selatan saat ini, Airin Rachmi Diany.
4. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 02 Siti Nur Azizah-Ruhamaben. Siti Nur Azizah merupakan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
 5. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 01 Muhamad-Rahayu Saraswati. Saraswati merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
 6. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri nomor urut 01 Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa. Hanindhito Himawan merupakan anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
 7. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 03 Ansar Ahmad-Marlin Agustina. Marlin Agustina merupakan istri dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
 8. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu nomor urut 02 Rezita Melyani-Junaidi Rachmat. Rezita Melyani merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto.
 9. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang nomor urut 01 Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa. Ratu Tatu Chasanah adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang Selatan saat ini, Airin Rachmi Diany.
 10. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 03 Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Kustini merupakan istri dari Bupati Sleman Sri Purnomo.
 11. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi nomor urut 02 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Sugirah. Ipuk Fiestiandani

- merupakan istri dari Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
12. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor urut 01 Muhammad Yusron Lagogau-Syahban Sammana. Yusron Lagogau merupakan keponakan dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Syamsudin A. Hamid.
 13. Di Pilkada Pangkajene dan Kepulauan, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 Andi Ilham-Rismayani juga terafiliasi dinasti politik, yaitu merupakan ipar dan istri dari Syamsudin.
 14. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung nomor urut 03 Benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah. Benny merupakan anak dari Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.
 15. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru Selatan nomor urut 03 Safitri Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily. Safitri merupakan istri dari Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.
 16. Calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 04 Irman Yasin Limpo-Andi Muh. Zunnun Armin Nurdin. Irman merupakan adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
- Faktanya kemudian setelah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah 2020, Bobby Afif Nasution dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan konstelasi pemilihan umum kepala daerah sebagai kepala daerah untuk masing-masing daerah, yaitu Bobby Afif Nasution sebagai Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Fakta ini merupakan sejarah baru di Indonesia, dimana seorang Presiden aktif memiliki anak dan menantu sebagai walikota untuk dua daerah berbeda.
- Dalam konteks demokrasi dan hak asasi, politik kekerabatan telah menimbulkan berbagai polemik, baik dari pihak yang menolak serta yang mendukung, ditengah-tengah masyarakat. Pihak yang menolak terhadap politik kekerabatan ini salah satunya

adalah, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal. Akbar Faisal (dalam Friski Riana, 2020:1) mengatakan dinasti politik merupakan perilaku kekuasaan sebelum mengenal demokrasi. Dampak dari perilaku ini ialah berkumpulnya kekuasaan di satu tangan dengan sokongan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan yang sudah ada. Menurut Akbar, lingkaran dinasti politik itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain. Dampaknya, persoalan di daerah tak diselesaikan karena formula yang digunakan adalah aman dan nyaman bagi semua.

Sementara itu, pihak yang mendukung terhadap politik kekerabatan ini memberikan argumentasi, salah satunya adalah bahwa politik kekerabatan akan memberikan wajah ideologi yang terjaga. Di mana setiap pergantian kekuasaan akan memberikan ruang konsolidasi yang jelas. Jadi tongkat estafet akan memberikan jaminan yang akan sulit dibelokkan oleh orang-orang yang berideologi

berbeda (Hikmawan Sutanto, 2020:1).

Politik kekerabatan sesungguhnya dipraktikkan di banyak negara, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Amerika Serikat, kita kenal dinasti Kennedy dan George Bush. Sebelum itu, ada juga John Adams (presiden kedua AS) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden keenam AS. Ada pula Franklin Delano Roosevelt (presiden ke-32 AS) yang adalah sepupu Theodore Roosevelt (presiden ke-26 AS). Roosevelt sendiri dikatakan memiliki hubungan kekerabatan dengan 11 presiden: 5 berdasarkan hubungan darah dan 6 lain karena pernikahan (Dinna Wisnu, 2013:1).

Dengan demikian, sangat menarik untuk mengkaji politik kekerabatan dalam pemilihan umum kepala daerah ini dalam berbagai perspektif. Dalam tulisan ini akan digunakan perspektif sosiologi pembangunan. Sebagai batasan dalam penulisan ini, permasalahan yang diangkat adalah : bagaimana perspektif sosiologi pembangunan

terhadap pemilihan umum kepala daerah?.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan pengamatan. Studi dokumen dan pengamatan dilakukan untuk mencari informasi tentang politik kekerabatan di Indonesia. Studi pengamatan dilakukan pada berita-berita yang terkait. Studi dokumen dilakukan pada buku, jurnal, putusan pengadilan yang terkait. Setelah diperoleh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman, akan diberikan beberapa definisi terkait kata kunci dalam tulisan ini.

Berdasarkan definisi dari Dewi Anggraini (2013:2-4), Shem Iba (2019:4-7), dan Titin Purwaningsih (2015:101) dapat disimpulkan bahwa politik

kekerabatan adalah adanya hubungan kekerabatan antara satu pejabat politik dengan pejabat/calon politik lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerabatan adalah istilah untuk menyebut atau menyapa orang yang terikat kepada diri sendiri karena hubungan keturunan, darah, atau perkawinan (kbbi.web.id/kekerabatan).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi perspektif adalah sudut pandang (kbbi.web.id/perspektif).

Sosiologi Pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi terapan yang mengkaji hubungan timbal balik dan dampaknya dari berbagai variabel (gejala) sosial yang terkait dengan perubahan sosial dan pengembangan masyarakat, termasuk di dalamnya proses modernisasi, teori keterbelakangan dan ketergantungan, pengaruh globalisasi dan sistem dunia, implikasi bantuan dari pihak luar, mobilitas sosial, perubahan berencana, pembangunan berdimensi kerakyatan, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan

struktural, pembangunan berwawasan gender, pembangunan pertanian, pembangunan pesisir, pembangunan sektor kehutanan, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dengan kata lain, muatan kajian dalam Sosiologi Pembangunan ini juga berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Berbagai introduksi baik yang berupa teknologi dan nilai-nilai baru dalam proses pembangunan tentu akan membawa dampak pada konstruksi sosial yang sudah ada sejak lama (Amir Fadillah, 2009:1).

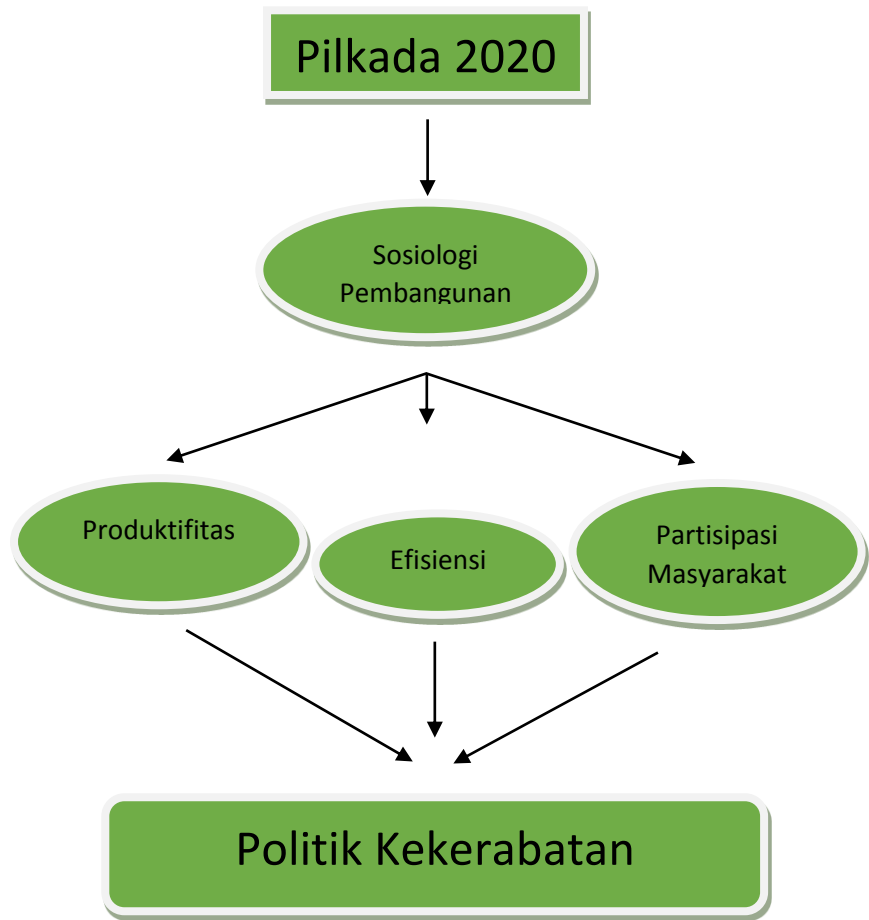
Beni Ahmad Saebeni dalam Kata Pengantar Buku Sosiologi Pembangunan (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016:vii) mengatakan dalam perspektif sosiologis, prioritas pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan sebagai upaya pemberantasan angka kemiskinan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar aspirasi masyarakat yang menghendaki

peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik, dengan visi dan misi kepemimpinan yang kondusif yang memiliki visi prospektif jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin dituangkan dalam rencana pembangunan nasional. Ada tiga indikator keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu produktifitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil apabila produktifitas masyarakat meningkat disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Tingkat efisiensi dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan definisi-defenisi tersebut dapat diambil alur fikir dalam tulisan ini, yaitu : adanya hubungan kekerabatan antara satu pejabat politik dengan pejabat/calon politik lainnya dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 berdasar pada sudut pandang satu cabang ilmu sosiologi terapan yang mengkaji hubungan timbal balik dan

dampaknya dari berbagai pada tiga indikator variabel (gejala) sosial yang keberhasilan pembangunan terkait dengan perubahan sosial masyarakat, yaitu dan pengembangan produktifitas, efisiensi, dan masyarakat, dengan melihat partisipasi masyarakat.

Dalam diagram berikut dapat dilihat alur fikir tulisan ini :



Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam kajian politik kekerabatan ini dilakukan. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini :

Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneli ti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbeda an
1	Syarif Hiday at	‘Shadow State’?: Business and politics in the province of Banten /2007	Kuatnya politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara <i>state</i> dan <i>society</i> , terutama pada interaksi <i>local state actors</i> (elite pemerintahan lokal) dan <i>societal actors</i> (jawara-pengusaha) dan terjadi <i>shadow state</i> dengan peran Tuan Besar.	Penelitian ini Tidak mengkaji tentang aktor akan tapi indikator dari keberhasilan dari politik kekerabatan melalui parameter tiga indikator , yaitu : Produktifitas, Efisiensi, dan Partisipasi Masyarakat.

2	Andi Faisal Bakti	Kekuasaan Keluarga di Wajo Sulawesi Selatan/2007	Desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis.	Penelitian ini Tidak mengkaji tentang sistem akan tapi indikator dari keberhasilan dari politik kekerabatan melalui parameter tiga indikator , yaitu : Produktifitas, Efisiensi, dan Partisipasi Masyarakat.
3	Wasisto Raharjo Djati	Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal	Familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme dan feodalisme yang ketiganya membentuk tipologi	Penelitian ini tidak mengkaji tentang kausalitas akan tapi

		/2013	rezim dinasti politik yang berbeda di Indonesia. karakter dinasti politik di Sulawesi Selatan adalah <i>tribalism dynasties</i> yang terbentuk dari reproduksi ritus-ritus budaya etnis, ikatan primordialisme, klan politik, dan stratifikasi sosial.	indikator dari keberhasilan dari politik kekerabatan melalui parameter tiga indikator , yaitu : Produktifitas, Efisiensi, dan Partisipasi Masyarakat.
4	Paweb aru Hijjan g dan Lia Ameli a	Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)/2019	Sistem kekerabatan dan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) mempengaruhi politik di Kabupaten Bone. Keturunan <i>Arung</i> (ba ngsawan) masih banyak memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan di Bone, hal ini salah satunya didukung oleh masyarakat Bone yang masih percaya jika dipimpin	Perbedaan sudut pandang kajian antara antropologi politik dan sosiologi pembangunan

			oleh kepala daerah yang bergelar <i>Arung</i>. Selain itu struktur pemerintahan juga dikuasai oleh kerabat dari Pemimpin daerah hal ini dikarenakan oleh sistem pemerintahan otonomi daerah membuat kekuasaan dipegang penuh oleh Bupati. Penelitian ini dilakukan di Kota Bone, Sulawesi Selatan dengan Informan sebanyak 17 orang yang terdiritokoh masyarakat dan tokoh agama, masyarakat Bone dan orang-orang yang memiliki pengalaman dibidang Politik/Pemerintahan seperti Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tim sukses partai politik dan Pejabat Daerah Bone.Adapun metode yang digunakan adalahwawancara mendalam (<i>indepth interview</i>),	
--	--	--	---	--

			pengamatan (<i>Observasi</i>) dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan di Kota Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Warisan budaya politik pada era kerajaan, masih berdampak dalam perilaku politik dewasa ini, namun pemaknaannya sudah berbeda dimana pada masa kerajaan masih murni memelihara kejujuran dalam menjalankan pemerintahannya. Beda halnya dengan saat ini dimana masa sekarang memanfaatkan lapisan sosial (<i>Arung</i>) dan sisitem kekerabatan tersebut sebagai strategi pemenangan pemilihan kekuasaan yang sistem pemerintahannya berkesan lambat. Dengan otonomi daerah banyak menimbulkan kasus- kasus dipemerintahan	
--	--	--	---	--

			dikarenakan orientasi kepentingan pemimpin didukung oleh sistem kekerabatan yang tidak sesuai lagi dengan sistem nilai budaya, dimana motto masyarakat bone <i>Lempu'</i> : bersikap jujur, <i>Getteng</i> : istiqamah dan <i>ada tongeng</i> : berkata benar.	
5	Budhi Priant o	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi /2016	Mendesripsikan munculnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah; mendeskripsikan peran partai politik dalam pembentukan dinasti politik; dan menjelaskan dampaknya terhadap desentralisasi pemerintahan di daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data utama dokumentasi yang dipilih secara purposive dari surat kabar Kompas. Data	Perbedaa n sudut pandang kajian antara desentral isasi dan sosiologi pembang unan

			yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis didasarkan pada berita atau informasi yang berkaitan dengan partai politik, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan fenomena munculnya dinasti politik di sejumlah daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktek demokrasi dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata dua, yang satu sisinya memberikan hak politik untuk dapat dipilih kepada individu atau kelompok, dan pada sisi yang lain merampas hak politik untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan necessary condition bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di	
--	--	--	--	--

			Indonesia. Tak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan baik di tubuh partai politik maupun pemerintah daerah tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam governance pemerintahan di daerah. Akibatnya, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah.	
--	--	--	---	--

Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, Sosiologi Pembangunan juga mendasarkan pada hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu sebelum melakukan kajian lebih lanjut, perlu menguraikan terlih dahulu mengenai pertanyaan, apakah politik kekerabatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia?.

Achmadudin Rajab (2020) menulis, Mahkamah Konstitusi

(MK) melalui putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015. Terlihat bahwa MK lebih banyak menggunakan pola pikir Hak Asasi Manusia (HAM) dalam membangun argumentasinya. MK berpandangan bahwa Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 dianggap telah bertentangan dengan HAM karena telah membatasi hak seseorang untuk maju sebagai calon dalam Pilkada. Padahal jika melihat latar belakang pemohon dalam

Perkara MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, jelas merupakan seseorang yang berpengaruh karena memiliki jabatan seorang anggota DPRD dan seorang anak dari bupati petahana di suatu daerah pada waktu itu. Dengan adanya Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah jelas maka Pemohon Perkara MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon dalam Pilkada karena memiliki hubungan darah secara langsung bahkan dengan petahana. Alhasil pada akhirnya MK mengabulkan permohonan tersebut dan Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Maka dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku politik kekerabatan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun dalam faknya terdapat banyak penolakan dari berbagai pihak.

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu Sosiologi Pembangunan melihat politik

kekerabatan ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu : Produktifitas, Efisiensi, dan Partisipasi Masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil apabila produktifitas masyarakat meningkat disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Tingkat efisiensi dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam produktifitas, ada konsensus yang menyatakan bahwa faktor-faktor penting dalam meningkatkan produktifitas tergantung pada manajemen, perencanaan yang lebih baik, prosedur kerja yang lebih efektif, komunikasi yang lebih baik, sumber sumber kemanusiaan yang lebih efektif, kebijakan pembuatan keputusan yang ditingkatkan dan sebagainya Semua usaha untuk menaikkan produktifitas dalam suatu daerah atau negara memerlukan organisasi serta manajemen yang kokoh untuk menyatukan langkah dalam semua sistem produksi. Pendekatan sistem-sistem produktifitas manajemen

berlandaskan pada dua konsep dasar : memusatkan pada *output* (hasil hasil sistemnya) dan keterpaduan bagian-bagian sub-sistem organisasinya dalam satu kesatuan. Tanggung jawab pokok manajemen dalam peningkatan produktifitas pada perusahaan adalah penetapan tujuan, membuat program peningkatan produktifitas serta memantapkan satu sistem pengukuran produktifitasnya (Sukotjo, 2009: 109-179).

Produktifitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong kehidupan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Mutu kehidupan di negara yang ekonominya telah maju ternyata lebih tinggi dibanding dengan mutu kehidupan di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam memasyarakatkan produktifitas, secara garis besar diantaranya adalah (Sukotjo, 2009: 109-179) :

a. Meningkatkan produktifitas nasional. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan terwujud kemakmuran rakyat yang ditandai dengan standard

hidup yang lebih baik. Standard hidup yang lebih baik antara lain, perolehan pendapatan perkapita lebih besar, pelayanan sosial semakin bervariasi, berkualitas dan lebih baik, pendapatan pemerintah dari berbagai sektor meningkat terutama dari sektor swasta. Hasil-hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan infrastruktur dan pengembangan pendidikan, yang dianggap sebagai pilar peningkatan kualitas disegala aspek kehidupan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diharapkan akan menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya.

b. Meningkatkan produktifitas regional. Di tingkat regional, masing-masing propinsi/kota/ kabupaten saling berlomba untuk berkeaktifitas dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi. Tingginya tingkat produktifitas di

- salah satu daerah, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lainnya.
- c. Meningkatkan produktifitas sektoral. Peningkatan produktifitas di tingkat sektoral memberi manfaat pada suatu daerah, untuk mengetahui sektor mana yang merupakan prioritas utama, yang perlu dikembangkan serta subsektor apa saja yang menjadi komoditi andalan daerah tersebut. Mengetahui peningkatan produktifitas tingkat nasional, regional dan maupun sektoral merupakan salah satu instrumen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
 - d. Memperkuat daya saing daerah, karena dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dan mutu produksi lebih baik.
 - e. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja.
- Dalam produktifitas ini perlu dilakukan upaya pengembangan masyarakat.
- Pengembangan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk : 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. (Andi Nu Graha, 2009:1). Pengembangan masyarakat harusnya

menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Soelaiman, 1998): 1. Transparansi (keterbukaan), 2. Partisipasi, 3. Dapat dinikmati masyarakat, 4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), 5. Berkelanjutan (*sustainable*).

Konsep pemberdayaan masyarakat atau masyarakat yang berdaya dalam konteks kekinian adalah masyarakat yang memiliki kepedulian dan kapasitas dalam menetapkan prioritas dan pemanfaatan dana publik yang sangat penting bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Sumodiningrat dalam Sardjono (2004) mengemukakan, bahwa keberdayaan masyarakat secara umum adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan hidup; dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidup. Dengan keberdayaan tinggi, masyarakat tidak saja akan mampu mempertahankan hak-haknya (termasuk dalam pengambilan keputusan), terutama dalam berhubungan dengan pemerintah.

Berdasarkan pendekatan proses, maka pemberdayaan masyarakat dimulai dari dalam masyarakat sendiri dan selanjutnya dibawa keluar institusi public (Pemerintah Daerah), pihak swasta (perusahaan) dan lembaga-lembaga lainnya. Menurut Whitmore dalam Sardjono (2004), bahwa pada dasarnya pemberdayaan bukanlah sesuatu yang dilakukan suatu pihak ‘untuk’ (*for*) atau ‘terhadap’ (*to*) pihak lainnya, akan tetapi pemberdayaan merupakan aktivitas reflektif, yaitu proses yang hanya dapat diawali dan dipertahankan pihak bersangkutan yang menginginkan kapasitas (*power*) atau penentuan nasib sendiri. Berbagai pihak lainnya hanya membantu dan bekerjasama dalam proses pemberdayaan ini dengan cara menciptakan iklim, hubungan, sumberdaya dan prosedur yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian, pada indikator produktifitas ini, politik kekerabatan harus dapat menjamin faktor-faktor penting dalam meningkatkan

produktifitas yaitu manajemen, perencanaan yang lebih baik, prosedur kerja yang lebih efektif, komunikasi yang lebih baik, sumber sumber kemanusiaan yang lebih efektif, kebijakan pembuatan keputusan yang ditingkatkan secara terus menerus. Produktifitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong kehidupan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Indikator selanjutnya, efisiensi pelaksanaan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi

(misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Melania Rampengan,dkk (2016:1) menyebutkan, dengan direvisinya UU No.22 tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan penegeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Karena masing-masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke

dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan termasuk pembangunan daerah melalui pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap

tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan. Pada umumnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Tuntutan baru untuk organisasi sector publik yaitu selalu memperhatikan *value for money*. Karena tujuan yang dikehendaki masyarakat selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan

alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta (berhasil guna) dalam arti mencapai sasaran Melania Rampengan,dkk (2016:1).

Selanjutnya, Ariel Sharon Sumenge (2013:74) menyatakan organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya.Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, pada indikator efisiensi ini, politik kekerabatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien

(berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta (berhasil guna) dalam arti mencapai sasaran.

Indikator terakhir, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum dari partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untukmenangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah setiap

bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, Negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumsukan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Dalam hubungan itu pemerintah Negara Republik Indonesia menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pada dasarnya pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahap pembangunan (Ibran, 2018:120).

Tujuan tahap pembangunan adalah untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 15 ayat (1), diuraikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di susun perencanaan dapat tercapainya tujuan pembangunan, hal ini diperlukan adanya keterlibatan langsung secara aktif dari masyarakat.

Menurut Astuti (2011:50) tingkat partisipasi masyarakat, terbagi atas :

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang

- keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.
- Pembangunan itu menuntut adanya partisipasi dari masyarakat yang menjalankan pembangunan itu. Koentjaraningrat (2000) menyebutkan ada dua type partisipasi yang pada prinsipnya berbeda. Yang dikatakan sebagai berikut :
- “Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua type yang pada prinsipnya berbeda, ialah :
1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama-sama proyek pembangunan yang khusus.
 2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Pada tipe partisipasi yang pertama, masyarakat diajak, diperintahkan oleh pemimpin desa atau wakil-wakilnya untuk ikut serta menyumbang tenaga atau hartanya dalam menunjang keberhasilan pembangunan proyek yang bersifat khusus. Biasanya proyek yang demikian bersifat fisik, contohnya partisipasi masyarakat desa membantu mengerjakan proyek inpres bantuan desa, inpres penghijauan dan melebarkan desa. Sedangkan pada tipe kedua, tidak ada aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada program pembangunan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat atas kemauan atau atas kesadaran individual. Dalam hal ini contohnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan modal nasional yaitu Tabanas, Program Keluarga Berencana. Dari uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dua tipe partisipasi itu mempunyai prinsip berbeda. Pada tipe yang pertama tumbuhnya partisipasi dari rakyat pedesaan belum secara spontanitas timbul, namun

mereka masih perlu untuk diajak, dibujuk, diperintah atau bahkan dipaksa oleh pihak atas, agar mereka memberikan partisipasinya secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam tipe kedua, partisipasi cenderung atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi pada tipe partisipasi yang kedua ini timbul berdasarkan atas keputusan mereka sendiri sebagai individu yang utuh (Prastiwi Mardjani, 2010:3).

Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam Adimihardja (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama

- proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ?
- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
 - e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.
 - f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
 - g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
 - h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
 - i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
 - j. Berhak menjadi bagian dari evaluasi mengenai situasi dirinya, serta diinformasikan agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dengan demikian, pada indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini, politik kekerabatan harus dapat menjamin dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Secara ringkasnya, kajian sosiologi pembangunan terhadap politik kekerabatan adalah :

- a. Harus dapat menjamin faktor-faktor penting dalam meningkatkan produktifitas yaitu manajemen, perencanaan yang lebih baik, prosedur kerja yang lebih efektif, komunikasi yang lebih baik, sumber sumber kemanusiaan yang lebih efektif, kebijakan pembuatan keputusan yang ditingkatkan secara terus menerus. Produktifitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong kehidupan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal.
- b. Harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam

penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta (berhasil guna) dalam arti mencapai sasaran.

- c. Harus dapat menjamin dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

C. KESIMPULAN

Dalam kajian ilmu sosiologi pembangunan terhadap politik kekerabatan ini tidak melihat pada apakah politik kekerabatan diperbolehkan atau tidak, tidak juga melihat dukungan atau penolakan terhadapnya, akan tetapi untuk mengukur politik

kekerabatan ini dinilai berhasil atau tidak dengan menggunakan ketiga indikator tersebut, ukuran ini dapat pula diterapkan pada konstelasi yang tidak berkaitan dengan politik kekerabatan. Dengan kata lain, berdasarkan kajian ini, sosiologi pembangunan tidak mempersoalkan politik kekerabatan dalam konstelasi pertarungan pilkada baik pada tahun 2020, sebelum tahun itu ataupun setelahnya jika ketiga indikator tersebut terpenuhi.

Untuk lebih mengkomprehensipkan penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai data tingkat keberhasilan dan kegagalan politik kekerabatan yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2020), Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Adon Nasrullah Jamaludin. (2016), *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia;Bandung.
- Adimihardja. (2004), *Participatory Research Appraisal dal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi Kedua, Humaniora Utama Press:Bandung.
- Amir Fadillah. (2009), *Sosiologi pembangunan : pengantar studi pembangunan lintas sektoral*, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39449>
- Andi Faisal Bakti. (2007). *Kekuasaan Keluarga di Wajo Sulawesi Selatan*. Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Andi Nu Graha. (2009), *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 5 Nomor 2, Juni 2009.
- Ariel Sharon Sumenge. (2013). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013.
- Astuti. (2011), *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Budhi Prianto. (2016), *Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Desentralisasi*, Publista Jurnal Adminsitasi Publik, Volume 1 Nomor 2-Oktober 2016.

- Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. (2006). *Political Dynasties*, SSRN <http://ssrn.com/abstract=909251>.
- Dewi Anggraini. (2013), *Politik Kekerabatan*, Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013.
- Dinna Wisnu. (2013), *Jaringan Politik Kekerabatan*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/29/1047509/Jaringan.Politik.Kekerabatan?page=all>
- Friski Riana. (2020), *Politik Dinasti Ramaikan Pilkada 2020, Ini Daftarnya*, tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1413795/dinasti-politik-ramaikan-pilkada-2020-ini-daftarnya?page_num=2
- Hikmawan Sutanto. (2020), *Dinasti Politik, Apa Yang Salah?*, rmol.id <https://rmol.id/read/2020/02/24/422640/dinasti-politik-apa-yang-salah>.
- Ibran. (2018), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)*, Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Volume 3 Nomor 2 April 2018.
- Isbandi. (2007), *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press: Depok.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui kkbi.web.id
- Koentjaraningrat .(2000), *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Edisi Kesembilan Belas, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi:Yogyakarta.
- Melania Rampengan,dkk (2016), *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 Nomor 3 Tahun 2016.

- Pawebaru Hijjang dan Lia Amelia. (2019), *Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)*, Jurnal Socius, Volume 6 Nomor 2.
- Prastiwi Mardjiani,. (2010), *Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa*, Bulletin Ekonomi Volume 8 Nomor 1, April 2010.
- Sardjono. (2004). *Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Debut Press. Jogjakarta.
- Shem Iba. (2019), *Dinasti Politik Kekerabatan (Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak)*, Tesis: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Soelaiman M.Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Sukotjo. (2009), *Produktifitas Suatu Faktor Penentu Bagi Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*, Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 12 Nomor 3, Agustus 2009.
- Syarif Hidayat. (2007), *Shadow State’?: Business and politics in the province of Banten*, Renegotiating Boundaries, Universitas Nasional Jakarta.
- Titin Purwaningsih. (2015), *Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan*, Jurnal Politik Volume 1, Agustus 2015.
- Tikson T Deddy (2005), *Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Innawa: Makassar.
- Wasisto Raharjo Djati. (2013), *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Volume 18 Nomor 2, Juli 2013.